

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Ysh. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, dan Komandan Kodim 0709 Kebumen.

Ysh. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian, dan para Camat se-Kabupaten Kebumen, wartawan media cetak maupun elektronik, hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD serta pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Alloh Subkhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah – Nya kepada kita

sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tiada halangan suatu apapun.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, diucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD, Komisi-Komisi DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah melakukan pembahasan Rancangan Perubahan KUAPBD dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 secara proporsional dan telah dilakukan kesepakatan pada tanggal 13 Agustus 2026.

Pimpinan DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum saya menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD, masyarakat pendengar Radio In-FM yang berbahagia sebagai berikut:

Pertama, kita baru saja meninggalkan bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia di mana kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat dan jiwa patriotisme para pejuang kemerdekaan yang

telah diwariskan kepada generasi penerus bangsa dapat terus kita jaga dan wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, kita juga telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-397. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran agenda rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten. Mari kita jadikan momentum peringatan hari jadi ini sebagai pemacu semangat untuk terus bergerak bersama, bergotong royong, dan berkarya demi mewujudkan Kabupaten Kebumen yang lebih maju dan sejahtera.

Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2026 yang lalu Pemerintah Kabupaten Kebumen meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah dilakukan dengan akuntabel, wajar, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perolehan opini WTP kali ini merupakan pencapaian ke-9 secara berturut-turut. Untuk itu Predikat WTP yang telah kita raih bersama agar dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Keempat, perlu kami sampaikan bahwa proses perubahan APBD ini sebelumnya telah didahului dengan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendasarkan pada

ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu penyesuaian atas:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NonFisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA. 2026.

Kelima, kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah, agar secara serius dan pro aktif mengikuti proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama-sama Legislatif, sehingga pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan efektif.

Pimpinan DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp2.905.938.596.332,00 (*Dua triliun, sembilan ratus lima miliar, sembilan ratus tiga puluh delapan juta, lima ratus sembilan puluh enam ribu, tiga ratus tiga puluh dua rupiah*) berkurang sebesar (Rp176.303.668,00) (*Seratus tujuh puluh enam juta, tiga ratus tiga ribu, enam ratus enam puluh delapan rupiah*) atau turun (0,01%) dari Pendapatan daerah semula pada APBD murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.906.114.900.000,00 (*Dua triliun, sembilan ratus enam miliar, seratus empat belas juta, sembilan ratus ribu rupiah*).

Adapun rasio dana transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, terhadap Pendapatan Daerah mencapai 79,92%, sedangkan PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 20,08%.

Dana transfer yang berasal dari dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama daerah, turun sebesar 0,07% pada Perubahan APBD tahun 2026. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian Pendapatan Transfer Ke Daerah.

Kita tentunya berharap rasio pertumbuhan PAD dapat terus ditingkatkan, namun pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 target PAD diproyeksikan mengalami penyesuaian penurunan sebesar 0,01% bila dibandingkan dengan target pendapatan murni tahun 2026.

Kontribusi terbesar dari penerimaan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 masih bersumber dari Retribusi Daerah sebesar 55,02% yang didalamnya terbesar berasal dari target retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya Pajak Daerah berkontribusi sebesar 39,61%, sedangkan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi sebesar 4,10% dan Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 1,27%.

Belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan yang ada dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Total belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.127.053.496.420,00 (*Tiga triliun, seratus dua puluh tujuh miliar, lima puluh tiga juta, empat ratus sembilan puluh enam ribu, empat ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp134.353.527.420,00 (*Seratus tiga puluh empat miliar, tiga ratus lima puluh tiga juta, lima ratus dua puluh tujuh ribu, empat ratus dua puluh rupiah*) atau naik 4,49% dari APBD murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.992.699.969.000,00 (*Dua triliun, sembilan ratus sembilan puluh dua miliar, enam ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Adapun belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 digunakan untuk Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain terdiri dari Pendidikan 34,96%, Kesehatan 19,41%,

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8,20%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,14%, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,98%, dan Sosial 0,31%.

Sedangkan Belanja Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar 6,82%, Belanja Urusan Pilihan 1,00%, Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 3,48%, Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 21,48%, Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 0,43%, Belanja Unsur Kewilayahan 2,50% dan Belanja Unsur Pemerintahan Umum 0,29%.

Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Belanja Operasi digunakan penyesuaian terhadap Belanja Pegawai pada masing-masing OPD meliputi Gaji dan Tunjangan ASN termasuk penganggaran gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan penghasilan PNS, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah serta gaji dan tunjangan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pembangunan yang mutlak diperlukan dialokasikan pada Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan infrastruktur pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kebumen, telah dialokasikan pada program yang ditetapkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan pada tahun 2026.

Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja Daerah. Pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah Perubahan terdapat defisit sebesar (Rp221.114.900.088,00) *(Dua ratus dua puluh satu miliar, seratus empat belas juta, sembilan ratus ribu, delapan puluh delapan rupiah)* ditutup dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan sebesar Rp223.214.900.088,00 *(Dua ratus dua puluh tiga miliar, dua ratus empat belas juta, sembilan ratus ribu, delapan puluh delapan rupiah)* yang terdiri dari SiLPA tahun 2025 sebesar Rp221.114.900.088,00 *(Dua ratus dua puluh satu miliar, seratus empat belas juta, sembilan ratus ribu, delapan puluh delapan rupiah)* dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp2.100.000.000,00 *(Dua miliar, seratus juta rupiah)*.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan sebesar Rp2.100.000.000,00 *(Dua miliar, seratus juta rupiah)* digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah untuk investasi pada BUMD sebesar Rp0,00 *(Nol rupiah)* dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 *(Dua miliar, seratus juta rupiah)* merupakan pemberian pinjaman kepada Gabungan Kelompok Tani sebesar Rp1.500.000.000,00 *(Satu miliar, lima ratus*

juta rupiah) dan pemberian dana bergulir untuk nelayan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Demikian penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan karunia – Nya kepada kita dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Kebumen, 1 September 2026

BUPATI KEBUMEN

ttd

Hj. LILIS NURYANI